

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh :

MUHAMMAD JAFAR AW

ABSTRAK

The role of political party influence on the condition and future of the nation, because by the outcome rather than the election will produce a new leadership, elected through general elections. Meaning rather than democratization in the life of the nation is one with a general election that will usher the nation to the leadership and the new government, in the hope that the new government will provide improvements in all areas of life. Thus, the change in policy direction of the nation and the country, not apart than the role of political parties that fill people's democratic party with a vision and mission of the party which varies according to the ideology they profess.

Peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilu tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat pemilihan umum. Makna daripada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan perbaikan kehidupan disegala bidang. Dengan demikian maka perubahan arah kebijakan bangsa dan negara tersebut, tidak terlepas daripada peranan partai-partai politik yang mengisi pesta demokrasi rakyat tersebut dengan sejumlah visi dan misi partai yang bervariasi sesuai dengan ideologi yang mereka anut.

A. PENDAHULUAN

Proses pendewasaan demokrasi di Indonesia telah melalui masa 16 tahun sejak tahun 1999, dan dalam perjalanannya telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi,&

DPRD Kab/Kota telah dilalui sebanyak 4 kali dengan 4 Presiden yang berbeda pasca pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam periode 16 tahu ke belakang telah banyak perubahan yang dialami Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi, diantaranya adalah Amandemen UUD 1945, kebebasan

pers, pemisahan yang jelas antara militer dan sipil, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Salah satu perubahan yang sangat penting sejak Reformasi adalah munculnya berbagai partai politik sebagai salah satu wujud kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul yang menjadi satu ciri utama negara yang menjalankan sistem demokrasi.

Perubahan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu dan meningkatnya sumber daya manusia merupakan tujuan bangsa Indonesia guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat disegala bidang kehidupan, dengan demikian akan tercipta kualitas hidup masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera dalam sebuah negara yang demokratis.

Berjalannya suatu pembangunan merupakan langkah sukses daripada kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang sukses diikuti oleh beberapa partai politik, yang merupakan agenda nasional bangsa Indonesia melalui pesta demokrasi yang diselenggarakan selama 5 (lima) tahun sekali. Yang mana perubahan politik dari pemilu tersebut sangat berpengaruh nyata terhadap perubahan pada suksesi kepemimpinan nasional maupun tingkat lokal bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi bangsa dan negara Indonesia.

Sebuah negara yang demokratis dalam keberlangsungannya sebagai

suatu negara yang menghormati hak-hak dan kewajiban warga negaranya serta yang memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam bidang politik, maka akan melakukan perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik di segala bidang yaitu lewat salah satunya adalah suksesi demokrasi dan penempatan perwakilan-perwakilan rakyat untuk duduk di dalam pemerintahan baik di eksekutif sebagai jabatan politik maupun di lembaga legislatif yang dihasilkan melalui Pemilu (Pemilihan Umum).

Selanjutnya sukses tidaknya pemilu tersebut tidak terlepas dari pada peran partai politik sebagai peserta pemilu. Partai politik tersebut berusaha melakukan perubahan terhadap kehidupan kenegaraan dengan misi dan visi yang beragam, yang semuanya tertuju pada pencapaian kesejahteraan bangsa dan negara.

Peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilu tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat pemilihan umum. Makna daripada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan perbaikan

kehidupan disegala bidang. Dengan demikian maka perubahan arah kebijakan bangsa dan negara tersebut, tidak terlepas daripada peranan partai-partai politik yang mengisi pesta demokrasi rakyat tersebut dengan sejumlah visi dan misi partai yang bervariasi sesuai dengan ideologi yang mereka anut.

Seiring dengan konsep demokrasi, maka parlemen menjadi badan yang memiliki hak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan kebijakan umum. Dan menyajikannya dalam bentuk konstitusi, yang pada awalnya hanya mempunyai kontribusi hak *privilege* atau jaminan hidup sehingga pada gilirannya dapat membatasi manggerakan Raja dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dengan demikian partai politik, sangat memegang peranan penting di dalam parlemen atau lembaga legislatif yang nantinya secara bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan menentukan arah dan tujuan suatu negara. Setiap partai politik akan membawa visi dan misi serta idealisme mereka dalam menarik simpati rakyat, dengan demikian diharapkan akan mendapat dukungan yang banyak dari rakyat. Dengan demikian akan dengan lancar memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat dalam rangka perannya dalam sebuah negara demokrasi, yang akan memberikan perubahan sosial dan

pandangan politik rakyat dengan keberadaan partai politik.

B. PEMBAHASAN

Sebuah negara yang demokratis, biasanya disana dihuni oleh banyak partai atau multi partai atau terdiri dari beberapa partai politik. Dengan demikian sebuah negara demokratis akan memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam sebuah partai politik guna ikut serta arah dan gerak perubahan negara bersangkutan ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita nasionalnya.

Menurut pendapat Suseno (1987 : 28) mengutarakan tentang pengertian negara sebagai berikut : *Pertama* negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. *Kedua* negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dengan demikian menguasai wilayah-wilayah itu.

Selanjutnya berbicara mengenai konsep demokrasi, disini demokrasi diartikan sebagai istilah yang bersifat yang universal. Namun tidak ada satu sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa atau semua negara. Istilah boleh sama, tetapi isi dan cara perwujudannya bisa berbeda-beda dari satu negara dengan negara lain.

Secara etimologis, istilah “demokrasi” berarti pemerintahan oleh rakyat, dengan rincian *demos* artinya rakyat dan *cratos* artinya pemerintahan. Tetapi dalam perkembangannya

demokrasi ini mengandung pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan dapat diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa disebut dengan demokrasi langsung. Adapula demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di legislatif.

Manusia adalah "*political animal*", menurut Aristoteles lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Di dalam setiap masyarakat, kekurangan sumber daya yang bernilai memaksa orang untuk bermain politik, untuk menentukan siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana (Lasswell, 1936). Politik adalah salah satu tipe interaksi manusia yang melibatkan suatu partai politik yang memperoleh dan menjalankan kekuasaan atas yang lainnya. Jika diserahkan kepada individu-individu sendiri, politik dapat menjadi suatu permainan yang buruk, dengan pemain-pemain yang mencoba saling mencekik untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing. Kondisi ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Thomas Hoobbes (1651) dengan pernyataannya "perang semua melawan semua".

Pada umumnya apa yang disebut politik itu berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut

proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan suatu negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud, maka diperlukan kekuatan (*Power*) dan kewenangan (*authority*).

Menurut pendapat Max Weber (Maran, 2001 : 22) mengutarakan pengertian daripada politik sebagai berikut : "Politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di antara negara maupun di antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara".

Mendefinisikan partai politik bukanlah hal yang mudah, para ahli yang mempelajari partai-partai politik cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda. Secara umum partai politik menurut pendapat Maran (2001 : 84) mendefinisikan sebagai berikut: "Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan". Anggota-anggota kelompok tersebut memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Selanjutnya pengertian partai politik menurut Neuman (dalam Maran, 2005 : 85) sebagai berikut : "Partai politik adalah sebagai organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan

kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat”.

Sedangkan pengertian daripada partai politik menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Dari beberapa definisi di atas, dapat kita kaji bahwa partai politik merupakan organisasi masa yang salah satu fungsinya memerikan perubahan cara pandang berpolitik pada masyarakat melalui salah satunya adalah pendidikan politik.

Timbulnya kematangan kondisi teknis, politik dan sosial sejak permulaan abad ke 20 dan terutama sesudah kemerdekaan telah berhasil mengubah kelompok-kelompok yang belum terorganisir menjadi sebuah kelompok yang terorganisir dan menjadi kelompok kepentingan. salah satu kelompok kepentingan tersebut adalah partai politik. Sebuah partai politik biasanya akan mengikuti pola struktur dari watak atau karakteristik dalam sebuah masyarakat, begitu pula di negara Indonesia.

Menurut pemaparan Nasikun dalam bukunya Sistem Sosial Indonesia (2004

: 66), dijelaskan bahwa pertama kali Partai Masyumi, yang menurut hasil pemilihan umum tahun 1955 merupakan partai paling besar sesudah PNI (Partai Nasional Indonesia), dan Partai Nahdatul Ulama yang merupakan partai paling besar nomor tiga sesudah Masyumi. Pertumbuhan kedua partai politik tersebut melampaui serangkaian kristalisasi yang cukup panjang. Pada tahun 1943, atas prakarsa pemerintah penjajahan Jepang, beberapa organisasi keagamaan termasuk Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama bergabung pada ke dalam suatu organisasi massa dengan nama “Masyumi” (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Dan partai politik pemenang pemilu tahun 1955 keempat adalah PKI (Partai Komunis Indonesia) yang juga cukup memiliki pendukung banyak terutama dari masyarakat pedesaan di pulau Jawa.

Partai politik dalam sebuah negara yang demokratis akan muncul dengan beberapa kepentingan. Menurut penulis kepentingan tersebut seperti karena *pertama*: ketidakpuasan akan rezim atau pemerintahan yang berkuasa, maka dengan demikian mereka yang mempunyai persamaan dalam kondisi ketidakpuasan. *Kedua* : karena ideologi tertentu yang menyebabkan mereka sebagai kelompok kepentingan ingin berpartisipasi politik dengan idealisme ideologinya. *Ketiga*: beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai kekuatan (*power*) ekonomi, intelektual dan kekuatan massa ingin

memperjuangkan kelompoknya dengan mereka sendiri dan ingin menjadi wakil dari mereka di pemerintahan yang berkuasa dan *keempat* : ketidakpuasan dan perbedaan paham akan kebijakan umum dalam sebuah partai politik tertentu, akan berdampak mereka memisahkan diri dengan partainya, atau sebaliknya mereka yang mempunyai banyak persamaan akan bergabung atau berkoalisi membentuk partai baru.

Guna mencapai tujuannya, partai politik harus menempuh beberapa langkah, seperti yang dikemukakan oleh Maran (2001 : 85) yaitu : *Pertama* partai-partai politik merekrut pengikut-pengikut mereka, menominasikan kandidat-kandidat mereka, mencari dana untuk mendukung pilihan-pilihan mereka untuk memegang jabatan publik. Tanpa partai-partai politik proses pemilihan wakil rakyat akan berjalan dengan baik. *Kedua* partai-partai politik merumuskan dan mempromosikan kebijakan-kebijakan yang merupakan cerminan opini publik. Dengan cara ini partai-partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat yang mereka wakili dengan pemerintah. *Ketiga* partai-partai politik menolong mengorganisir institusi-institusi utama pemerintah. Posisi-posisi kepemimpinan dalam badan legislatif dan komisi-komisinya dibagi berdasarkan partai yang memiliki anggota yang paling besar di parlemen.

Partai politik merupakan gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok

atau golongan yang bermaksud melakukan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan bermaksud menciptakan suatu tatanan masyarakat yang sama sekali baru. Gerakan sosial mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya, kadang-kadang juga bersifat ideologis. Hal ini merupakan sarana integritas partai politik atau sarana perekat kuat bagi persatuan para anggotanya dan menjadi penentu identitas kelompoknya.

Awal dari terbetuknya partai politik adalah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan gerakan dimana terdapat kelompok masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir yang diaksudkan untuk memperjuangkan atau memperoleh tujuan tertentu sesuai dengan cita-cita bersama. Melalui gerakan-gerakan sosial para partisipan pada dasarnya berpartisipasi dalam kehidupan politik. Akan tetapi partisipasi mereka belum tentu terorganisir dengan baik. Jika para partisipan suatu gerakan sosial ingin meneruskan perjuangan mereka secara lebih sistmeatis dan teratur dalam jangka panjang, mereka harus membentuk partai politik atau sekurang-kurangnya mereka harus bekerja sama atau mendukung suatu partai politik yang ada.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 6 (enam) menjelaskan mengenai

tujuan partai politik adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan umum partai politik adalah :
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesuai apa yang menjadi tujuan umum dan tujuan khusus dari partai politik di atas, dalam peranannya tentunya harus dapat mengemban aspirasi rakyat. Jangan sekali-kali mencoba mengkhianati kepercayaan rakyat, konsekuensinya akan tidak mendapat dukungan pada pemilihan umum berikutnya dan pada akhirnya partai politik yang demikian akan banyak ditinggalkan oleh konstituennya.

Menurut Miriam Budiarmo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (1994 : 26) partai politik berfungsi atau mempunyai peranan sebagai berikut :

1. *Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.*

Fungsi ini terkait dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini suatu partai politik mampu untuk melakukan komunikasi vertikal. Tetapi untuk itu partai politik hendaknya mampu berkomunikasi secara horizontal. Yang dimaksud adalah komunikasi antara warga, antara kelompok, dan antar partai politik dengan pemerintah. Melalui proses komunikasi secara horizontal berbagai pendapat dan aspirasi politik yang berkembang dikalangan masyarakat luas dapat diserap dan ditampung oleh para pemimpin partai politik yang bersangkutan. Mereka merumuskan secara baik-baik pendapat serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.

2. *Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.*

Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang umumnya berlaku pada masyarakat dimana ia berada. Proses ini juga pendidikan politik, yang berlangsung secara bertahap mulai dari masa kanak-

kanak hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi, norma-norma dialihkan dari generasi tua kepada generasi muda. Melalui pendidikan politik yang berlangsung secara sistematis dan demokratis.

3. *Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.*

Partai politik pun berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, tanpa rekrutmen politik suatu partai politik tidak akan memiliki anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan politik. Dengan rekrutmen politik dimaksud upaya partai politik untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota. Dengan cara ini suatu partai politik memperluas partisipasi politik dikalangan masyarakat.

4. *Partai politik sebagai sarana pemberes konflik.*

Dalam kehidupan masyarakat demokratis, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi. Perbedaan dan persaingan dalam bentuk apapun bisa menjadi sumber konflik, baik antara individu maupun antara kelompok. Jika terjadi konflik maka tugas partai politik untuk mengatasinya.

Dari uraian di atas dapat kita kaji bahwa peranan partai politik dalam sebuah negara yang demokratis akan

berkembang sesuai dengan kepentingan daripada partai-partai yang ada dalam rangka mengaspresiasi seluruh kepentingan rakyat, disamping itu partai politik di dalam memainkan peranannya sebagai kelompok kepentingan yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu dibatasi oleh hak dan kewajibannya sebagai partai politik yang sah dalam sebuah negara demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang Partai Politik serta Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dengan baik.

Karena lewat partai politik maka rakyat lewat lembaga perwakilannya akan mendapatkan jembatan aspirasi yang bermanfaat bagi suara rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian peranan sebuah partai politik dalam sebuah negara yang demokratis merupakan jembatan bagi penyampai aspirasi seluruh rakyat, yang akan memberikan perubahan sosial dan politik secara besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian atau paparan makalah ini, maka selanjutnya penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan partai politik sangat dominan dalam sebuah negara yang demokratis. Karena dengan adanya partai politik sebagai kelompok kepentingan yang terorganisir dan

mempunyai tujuan dan cita-cita yang jelas, maka organisasi partai politik tersebut tersebut akan menjadi jembatan bagi rakyat untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasinya.

2. Peranan partai politik tidak hanya sebagai organisasi politik, akan tetapi sebuah organisasi yang memberikan pendidikan politik pada rakyat, melalui pendidikan politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis.

II. SARAN

1. Suatu partai politik dapat menanamkan sekaligus mengembangkan kesadaran politik dimaksudkan menumbuhkan kesadaran seseorang sebagai warga negara yang baik akan hak dan kewajibannya. dengan demikian diharapkan melalui pendidikan politik, seorang warga negara akan tahu kepentingan pribadi atau kelompok hendaknya ditempatkan di bawah kepentingan bersama atau kepentingan nasional.
2. kepada mereka yang terpilih menjadi pejabat politik dalam pemerintahan dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang nyata lewat perubahan kearah pembangunan yang lebih baik di segala bidang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam, 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Eman Hermawan, 2002. *Politik Membela Yang Benar; teori, kritik, dan nalar*, Klik R, Jogjakarta, Klik R.
- Kamaruddin. 2007. *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Bangsa*. Bandung. Rosdakarya.
- Lasswell, Harold, 1950. *A Study of Power*. Illinois : The Free Press.
- Maran, Raga Rafael, 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nasikun, 2004. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Soelistyati Ismail Gani, 1984 *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta. Ghalia Indonesia,
- Tauhid. 2009. *Sistem Perpolitikan di Indonesia*. Surabaya: PT Bintang Terang,